

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dalam pemaparan yang telah diuraikan dalam analisis di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam kasus joko driyono tersebut dapat disimpulkan bahwa para pelaku dalam kasus perusakan barang bukti berkaitan dengan mafia bola terdapat implikasi atau akibat hukum bagi pelaku yang tersangkut Paut dengan kasus sebelumnya yakni melahirkan tindak pidana baru yaitu perusakan barang bukti yang dapat menjerat pelaku dengan pasal 233 juncto pasal 55 ayat 1 kitab Undang-undang hukum pidana,dengan yang statusnya tadinya sebagai saksi sekarang menjadi tersangka.
2. Sedangkan kasus suap wasit asal garut, dalam kasus pengaturan skor ketika pertandingan ps persibara melawan ps pasuruan oknum wasit menerima suap itu diduga menerima suap sebesar Rp 45 juta untuk memenangkan ps persibara dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap.dengan adanya penangkapan wasit yang terbukti melakukan pengaturan skor ini menjadikan efek jera bagi pelaku dan menjadikan per sepakbolaan indonesia menjadi lebih maju.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan yang telah penulis uraikan pada paragraf di atas maka dengan demikian penulis memberikan suatu saran bagi penelitian ini diantaranya:

1. Menurut pendapat penulis dalam kasus tersebut seharusnya para penegak hukum lebih memperhatikan tindak pidana pokok nya terlebih dahulu sehingga barang bukti yang seharusnya menjadi objek penelitian tidak di salahgunakan atau dihilangkan oleh pihak yang bersangkutan dan berkaitan dengan tindak pidana tersebut dapat diamankan sebelumnya karna rawan akan pengrusakan barang bukti seharusnya kasus jokodriyono bisa pula dijerat dengan tindak pidana suap karna sebagai petinggi kekuasaan pasti memiliki peran atau terlibat dalam kasus pengaturan skor.
2. Penegakan hukum harus selaras dengan tujuan pemerintah dalam memberantas mengenai kasus mafia bola dari kedua kasus tersebut jelas merupakan tindak pidana suap yang notabene adalah program yang khusus di tangani dan di cegah oleh pemerintah dalam rangka membersihkan pendayagunaan aparaturnegara dan reformasi birokrasi.sehingga menciptakan iklim persepakbolaan yang memiliki integritas yang mampu bersaing dengan negara luar dengan adanya satgas mafia bola akan memberikan efek terhadap prestasi dan kemajuan persepakbolaan.

DAPTAR PUSTAKA

A. SUMBER BUKU

- Andi Zainal abidin. *Azaz-Azaz Hukum Pidana Bagian pertama*. Alumni Bandung 1987.
- Amiruddin, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, 2010, Yogyakarta,
- Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Adami chazawi, *Pelajaran hukum pidana*, Raja Wali pers, jakarta, 2008.
- Andi Hamzah , *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, 2006 ,
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia indonesia & seksi ke pidanaan FH UGM, yogyakarta, 2010
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2011
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan*, KPK, 2009,
- E.Y. kanter dan S.R Sianturi, *Asas Hukum Pidana di indonesia dan penerapannya*, Storia Grafika jakarta 2002,
- Ginjar Wahyudi, “*Kajian Tentang Penyuapan Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi*”, *Skripsi* (Surakarta: Fak. Hukum Universitas Surakarta, 2011),
- Guse Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek*, Pustaka Pena, Yogyakarta, 2010,
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Politeia, Bogor, 1995,
- R. Sugandhi, 1980. *K.U.H.P Dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980.
- R. Wiryo, *Perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, 2005,

Rusli effendi, *Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Indonesia*, Binacipta, Jakarta,

Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, 2009

B. SUMBER-SUMBER PERUNDANGAN

Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang hukum pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap

Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana korupsi

C. SUMBER LAIN

<https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi> diakses pada 25 september 2019 Pukul 01.14 wib.

<http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-tindak-pidana.html> diakses pada tanggal 2 september 2019, pikul 22.08 wib.